

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Perekonomian Wilayah Sangat Bergantung Pada Sektor Primer Khususnya Pertanian
 - 3.2 Peranan Investasi Dalam Perekonomian Daerah Relatif Rendah
 - 3.3 Kualitas Pekerjaan Yang Tersedia Masih Rendah
 - 3.4 Kualitas Infrastruktur Wilayah Rendah
 - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Dana Simpanan Masyarakat Terbatas
 - 3.7 Kualitas Belanja Pemerintah Belum Mendukung Kinerja Perekonomian
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Bengkulu 2014

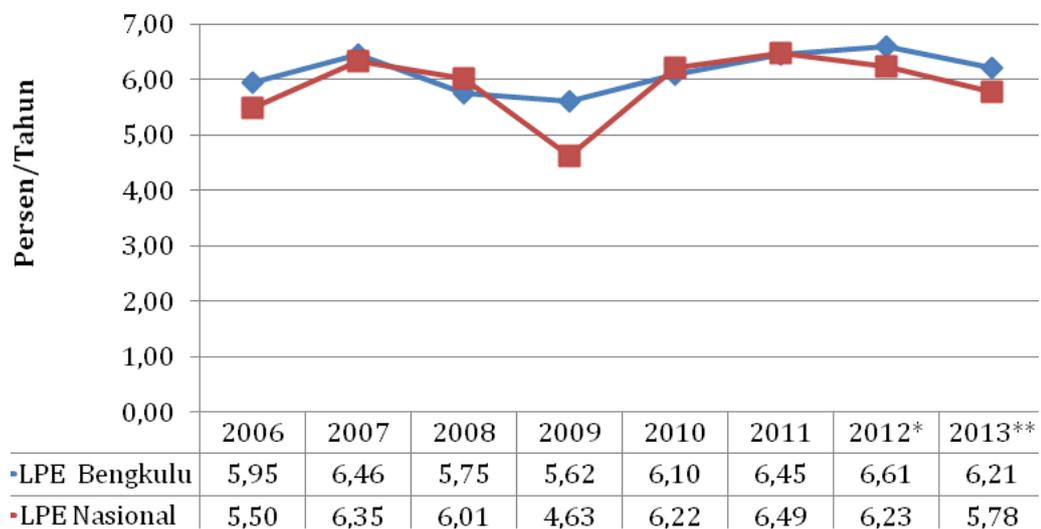
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu selama periode 2006-2013 cukup baik. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 yang bertumbuh pada laju rata-rata 6,14 persen per tahun. Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) yang berada pada angka 5,9 persen per tahun pada periode yang sama (Gambar 1). Di tingkat wilayah, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan output (PDRB) terkecil dengan sumbangan sebesar 1,5 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Sumatera dan sebesar 0,3 persen terhadap pembentukan PDB nasional (2012).

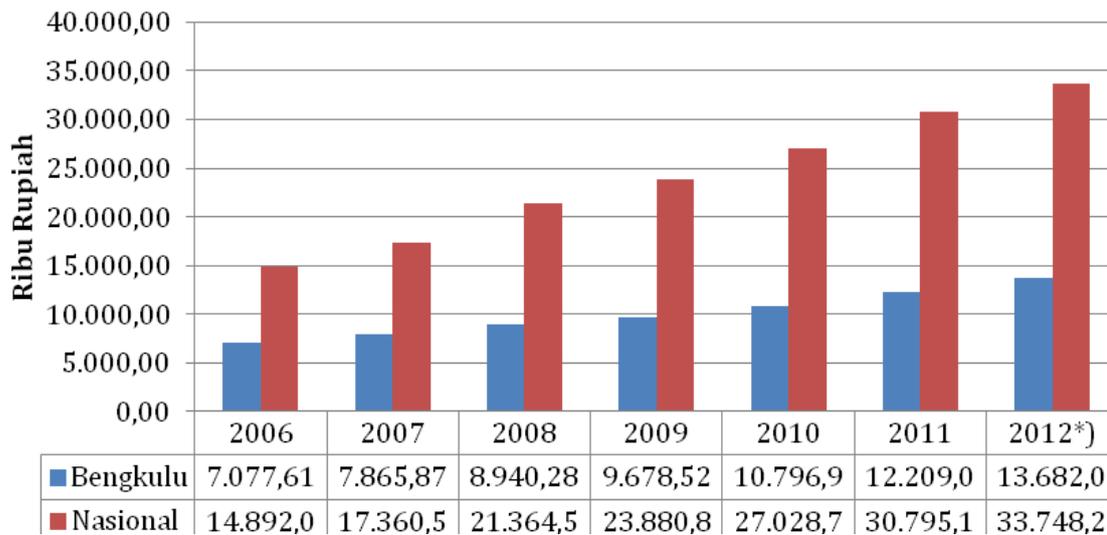
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Laju pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Bengkulu dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB per kapita Bengkulu dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 47,53 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 40,54 persen (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

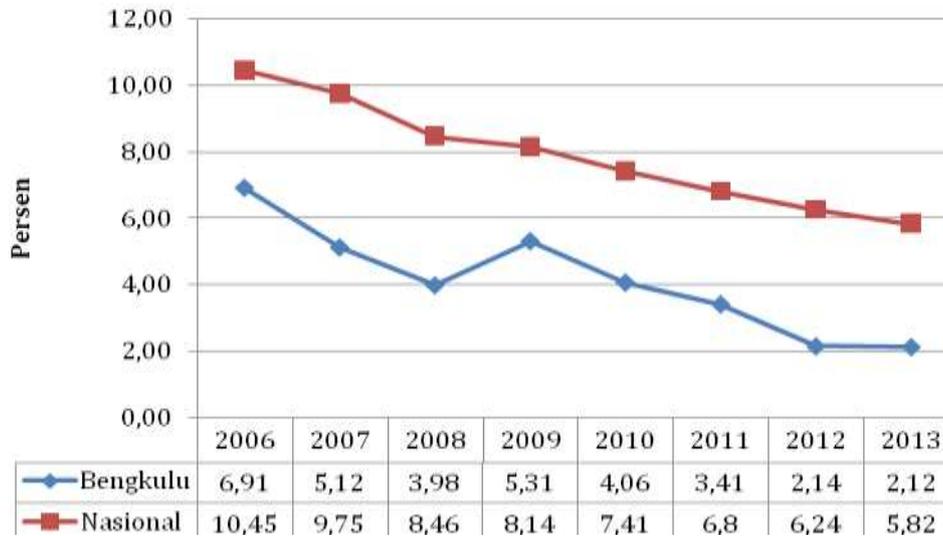


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Bengkulu termasuk rendah (Gambar 3). Rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

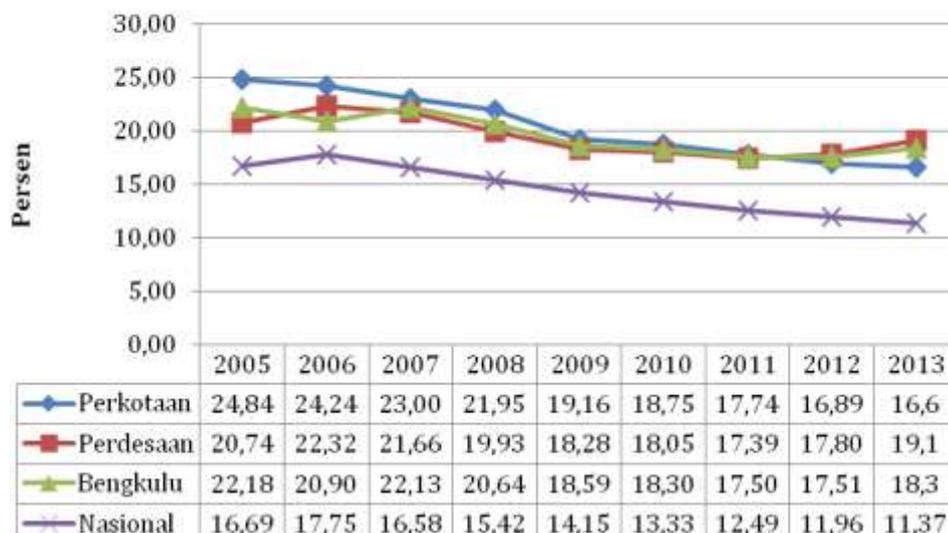


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Bengkulu cenderung menurun selama 2006-2013, khususnya di perkotaan. Secara nasional tingkat kemiskinan di Bengkulu masih tergolong cukup tinggi. Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, tingkat kemiskinan di Bengkulu masih mencapai 18,3 persen (Gambar 4). Di tingkat wilayah Sumatera kondisi kemiskinan di Bengkulu ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Aceh.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

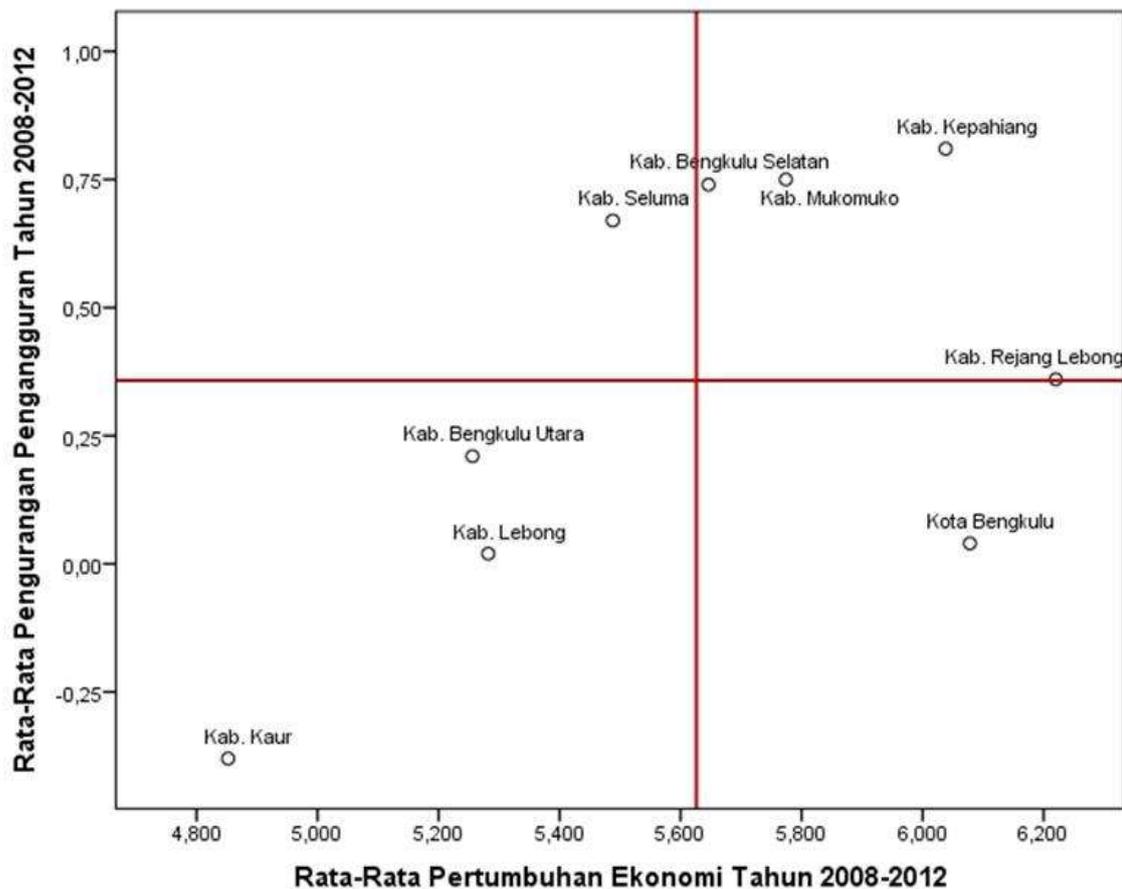
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5). *Pertama*, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Mukomuko, dan Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Seluma yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, dan Kaur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6, menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut.

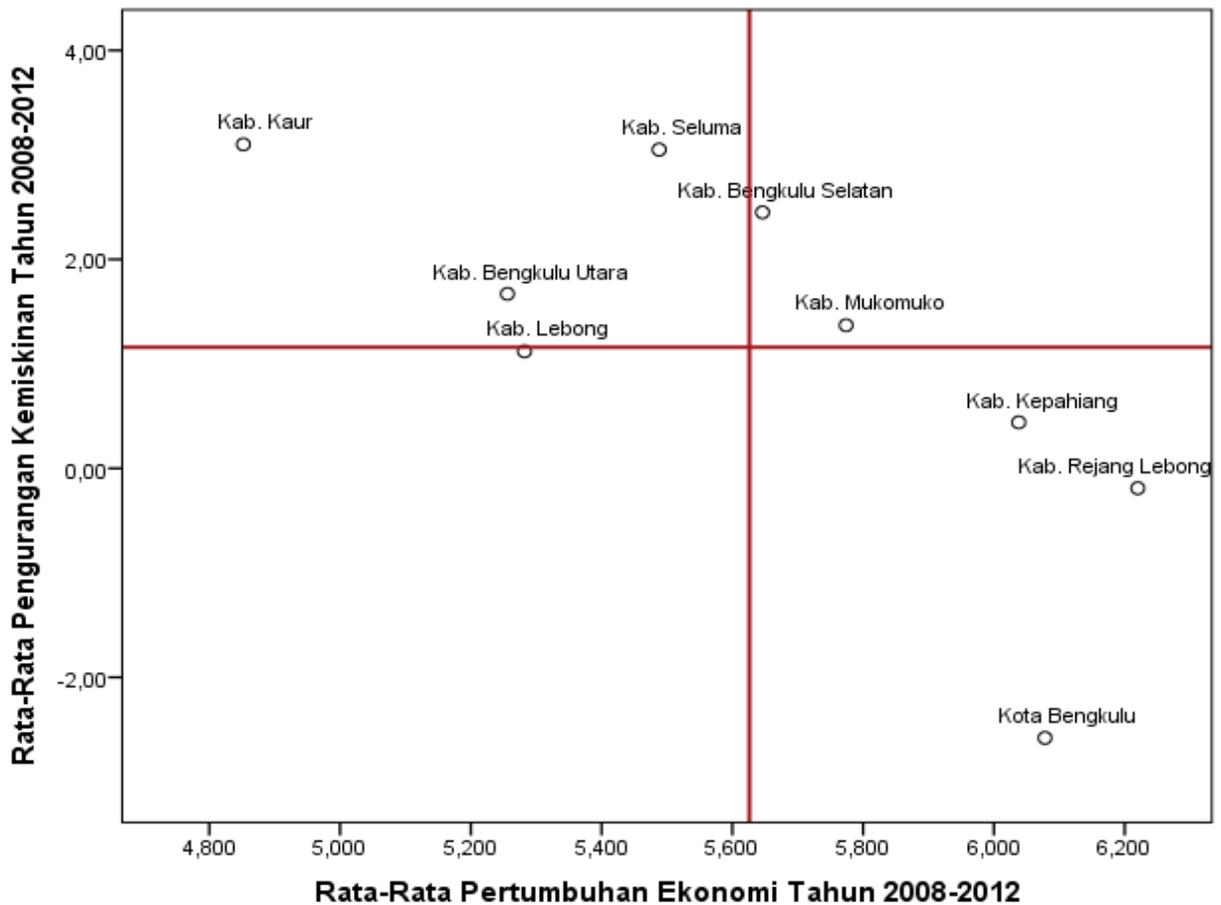
Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Mukomuko termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, kabupaten Kaur, Seluma, dan Bengkulu Utara terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Lebong terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan

ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



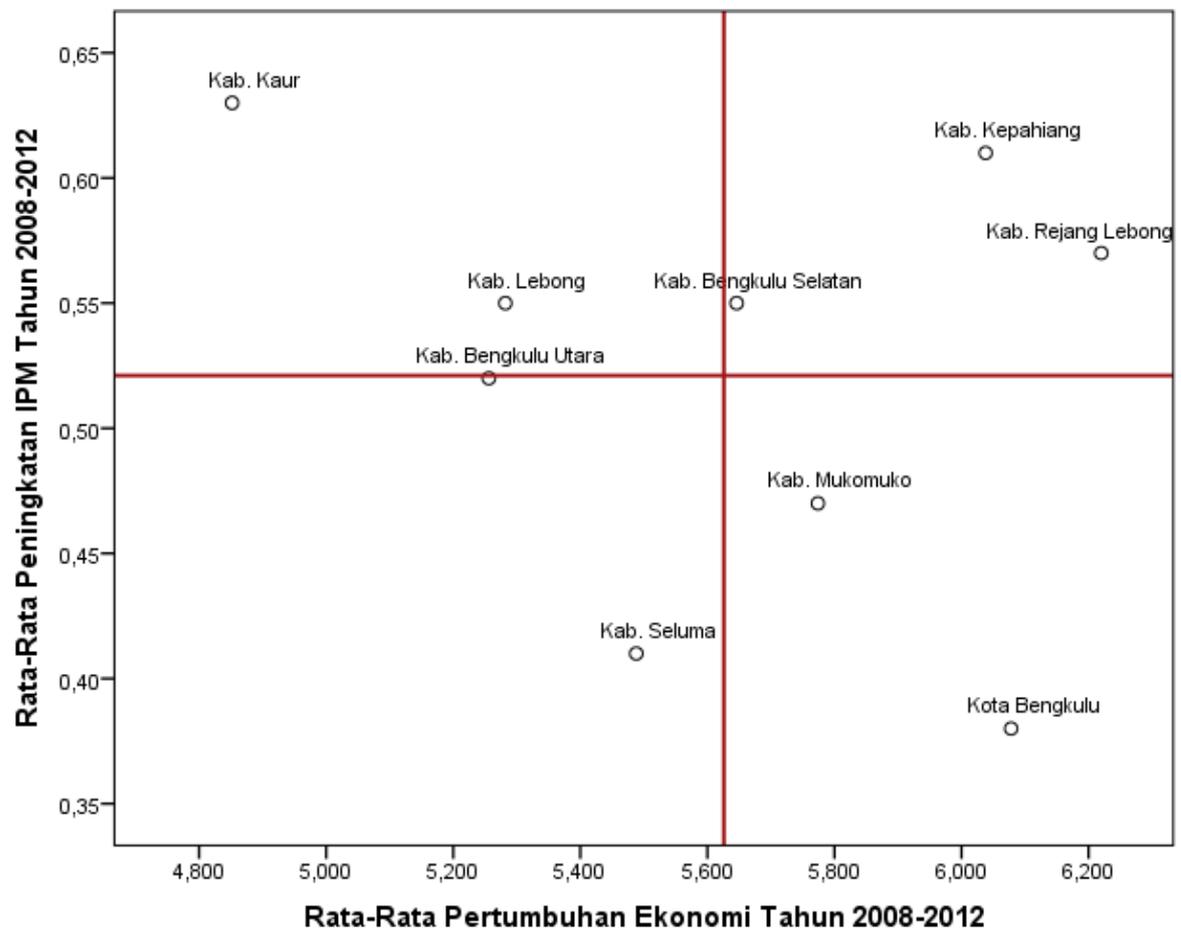
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong masuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan IPM
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Lebong, Kaur, dan Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi

peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Seluma terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

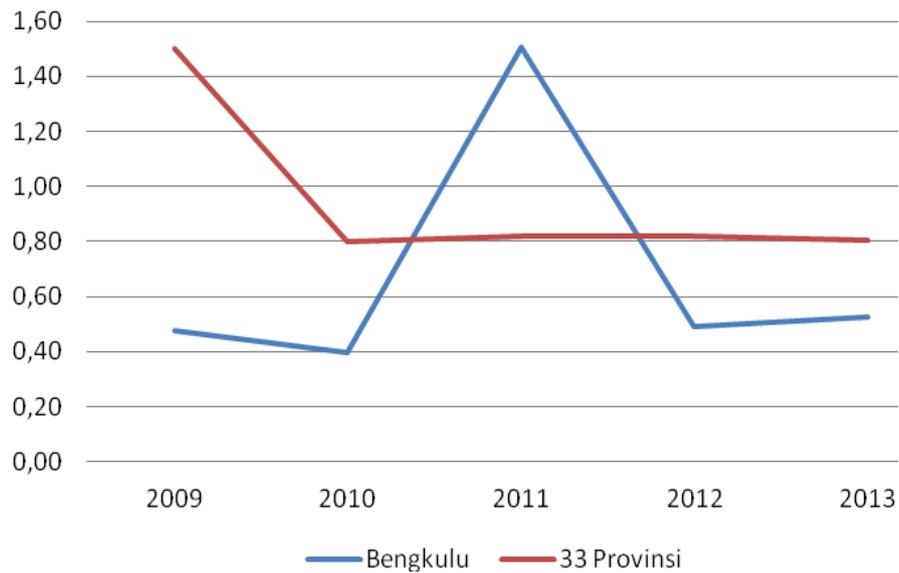
Keempat, Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Bengkulu berfluktuatif berada di atas rata-rata 33 provinsi. Kesenjangan ekonomi di Bengkulu dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapi Bengkulu pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Bengkulu terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Besarnya pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Bengkulu memiliki besaran yang hampir sama karena kesamaan struktur perekonomian di wilayah ini, yaitu pada sektor pertanian. Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi memiliki nilai PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Bengkulu, dan jauh meninggalkan kota dan kabupaten lainnya. Ketersediaan infrastruktur perkotaan turut mendukung tingginya PDRB perkapita di daerah ini

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bengkulu Selatan	6.601	7.242	7.634	8.512	9.512	10.527
Rejang Lebong	10.568	11.735	12.898	14.729	16.524	18.473
Bengkulu Utara	5.480	5.872	6.155	6.567	7.250	7.939
Kaur	3.833	4.272	4.545	4.875	5.288	1.564
Seluma	3.435	3.819	4.099	4.526	4.992	15.492
Mukomuko	6.222	7.577	8.056	8.786	9.844	10.985
Lebong	8.290	9.127	9.836	10.971	11.987	13.303
Kepahiang	9.059	10.389	11.543	12.945	14.577	16.607
Bengkulu Tengah	-	6.827	7.584	8.696	9.813	11.129
Kota Bengkulu	11.887	13.100	13.870	14.871	16.726	18.648
Bengkulu	7.866	8.940	9.679	10.797	12.209	13.682

Sumber: BPS, 2013

C. Analisa Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Perekonomian Wilayah Sangat Bergantung Pada Sektor Primer Khususnya Pertanian

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi sektor pertanian, diikuti perdagangan dan jasa-jasa. Sementara itu peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Pangsa sektor industri pengolahan, utilitas (listrik, gas, air), dan konstruksi hanya sekitar 5 persen dalam PDRB tahun 2013 (Tabel 2). Sementara itu dari sisi pertumbuhan sektoral, pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sektor perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

No	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	38,34	36,38
2.	Pertambangan	3,88	3,38
3.	Industri Pengolahan	4,49	4,46
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,53	0,49
5.	Konstruksi	3,80	3,12
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,41	20,39
7.	Angkutan, Telekomunikasi	8,07	8,31
8.	Keuangan	4,93	5,05
9.	Jasa-jasa	16,54	18,42
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Hal yang menjadi masalah adalah rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian. Jika produktivitas diukur dengan rasio antara output sektoral dan jumlah orang bekerja di sektor tersebut, maka produktivitas sektor pertanian hanyalah Rp 11,8 juta, paling rendah diantara sektor-sektor yang lain. Tingkat produktivitas pekerja di sektor pertanian hanya separuh dari tingkat produktivitas di sektor manufaktur, seperlima dari sektor pertambangan, dan sepersepuluh dari sektor keuangan.

Kuatnya peran pertanian dalam perekonomian daerah juga bisa dilihat dari analisis sektor basis. Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, semuanya memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih besar dari satu (Tabel 3). Hal ini menunjukkan Bengkulu memiliki proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut. Sebaliknya semua sektor di kelompok industri pengolahan memiliki nilai LQ kurang dari satu.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Bengkulu 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,88	2,89	2,88	2,94	2,96
a. Tanaman Bahan Makanan	2,60	2,62	2,64	2,73	2,75
b. Tanaman Perkebunan	6,08	6,32	6,31	6,49	6,59
c. Peternakan	1,67	1,71	1,74	1,73	1,76
d. Kehutanan	1,74	1,73	1,69	1,69	1,70
e. Perikanan	1,95	1,78	1,66	1,56	1,52
2. Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,44	0,47	0,46	0,49
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	1,05	1,06	1,10	1,06	1,07
c. Penggalian	0,59	0,58	0,60	0,53	0,52
3. Industri Pengolahan	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,62	0,61	0,68	0,65	0,65
a. Listrik	0,40	0,42	0,53	0,51	0,51
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	2,56	2,83	2,80	2,59	2,62
5. Konstruksi	0,48	0,47	0,48	0,48	0,49
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,16	1,19	1,15	1,11	1,10
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,31	1,35	1,29	1,24	1,22
b. Hotel	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21
c. Restoran	0,52	0,50	0,52	0,54	0,56
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,03	0,92	0,88	0,87	0,82
a. Pengangkutan	2,12	2,03	2,06	2,08	2,03
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	3,51	3,38	3,47	3,62	3,56
3). Angkutan Laut	3,84	3,88	4,26	4,12	3,91
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,53	0,50	0,47	0,54	0,50
5). Angkutan Udara	0,45	0,44	0,40	0,38	0,37
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,23	0,23	0,24	0,26	0,25
b. Komunikasi	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
a. Bank	0,27	0,28	0,30	0,30	0,30
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,98	0,93	0,96	0,96	0,98
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,77	0,78	0,79	0,82	0,85
e. Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,27	0,29	0,29
9. Jasa-jasa	1,78	1,76	1,85	1,88	1,93

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Pemerintahan Umum	3,00	3,02	3,23	3,35	3,55
b. Swasta	0,84	0,80	0,82	0,81	0,81
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,80	0,79	0,79	0,77	0,76
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,47	0,43	0,43	0,45	0,44
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,89	0,84	0,88	0,86	0,87

LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014, meski pangsaanya masih kecil sektor industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	535.224	555.316	20.092
2	Pertambangan	9.826	4.776	-5.050
3	Industri Pengolahan	30.431	35.886	5.455
4	Listrik, Gas, Air	1.150	3.095	1.945
5	Bangunan	28.174	29.685	1.511
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	103.767	145.825	42.058
7	Angkutan & Telekomunikasi	23.652	24.322	670
8	Keuangan	4.495	7.340	2.845
9	Jasa-Jasa	106.109	146.213	40.104
	Total	842.828	952.458	109.630

Sumber: BPS, 2014

2. Peranan Investasi Dalam Perekonomian Daerah Relatif Rendah

Jika PDRB dianalisis dari sisi penggunaan, peranan konsumsi rumah tangga sangat besar dengan pangsa lebih dari 60 persen. Sedangkan pangsa investasi (Pembentukan Modal tetap Bruto) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah hanyalah sekitar 11 persen, jauh di bawah angka rata-rata 33 provinsi 24 persen. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Namun demikian terdapat tren meningkatnya pertumbuhan investasi. Meskipun konsumsi rumah tangga masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah, namun selama periode 2005-2009 peran investasi semakin meningkat dan menggeser konsumsi pemerintah sebagai sumber pertumbuhan kedua.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan, 2013

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
	PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,56	62,70
2. Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,86	0,96
3. Konsumsi Pemerintah	15,69	16,17
4. PMTB	11,06	12,02
5. Perubahan Stok	-2,13	-0,53
6. Ekspor	29,46	29,38
7. Impor	14,50	20,70
	100,00	100,00

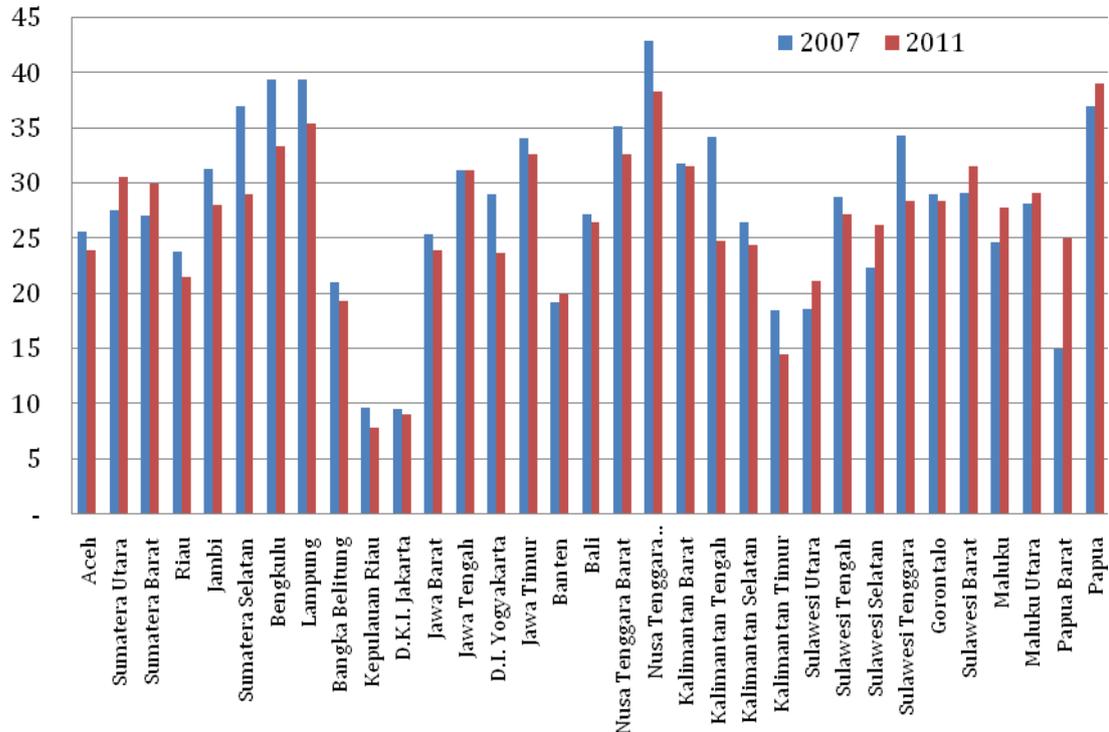
Sumber : BPS, 2013

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Bengkulu telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implelementasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

3. Kualitas Pekerjaan yang Tersedia Masih Rendah

Fakta tingginya persentase kemiskinan daerah yang diiringi dengan tingkat pengangguran rendah tampaknya berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber : BPS, 2011

Meskipun persentasinya menurun dari tahun 2007 ke 2011, namun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Bengkulu termasuk yang tertinggi secara nasional (Gambar 9). Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Bengkulu mencapai 33 persen, lebih rendah dari Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Jika kita sandingkan fakta ini dengan fakta lain penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian dan rendahnya produktivitas, maka kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri. Pengembangan industri yang sesuai adalah industri berbasis pertanian dalam arti luas (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis).

4. Kualitas Infrastruktur Wilayah Rendah

Posisi Bengkulu yang relatif terisolir sangat bergantung pada jaringan jalan Jalur Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Secara keseluruhan wilayah Bengkulu dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 7.776 km. Dari segi kuantitas ketersediaan jaringan jalan di Bengkulu cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kepadatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen. Angka kepadatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih tinggi dari angka nasional dan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. (Tabel 6)

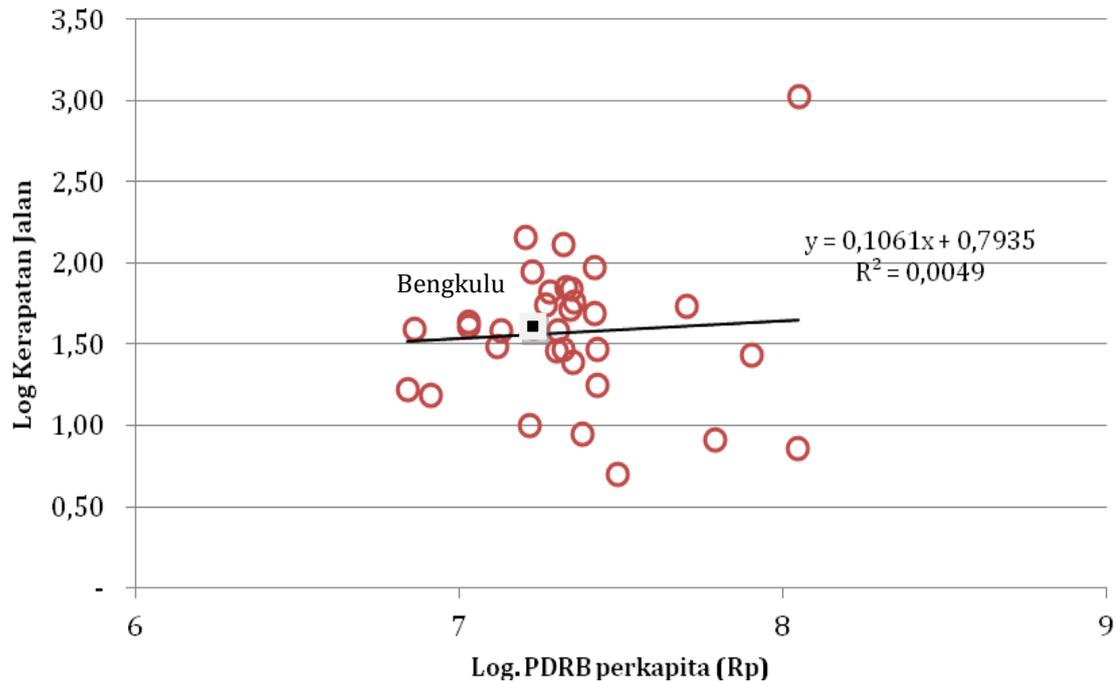
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
29	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Cara lain untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah adalah dengan membandingkan tingkat kerapatan jalan dan pendapatan perkapita antarprovinsi di Indonesia. Hal ini didasari asumsi bahwa terdapat korelasi antara kerapatan jalan dan tingkat pendapatan per kapita di suatu perekonomian.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Bengkulu relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Gambar 10). Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Bengkulu.

Dari segi kualitas, terlihat bahwa hampir 40 persen panjang jalan di Bengkulu masih belum beraspal (Tabel 7). Kondisi ini mengurangi daya dukung jalan bagi pergerakan barang. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang akhirnya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

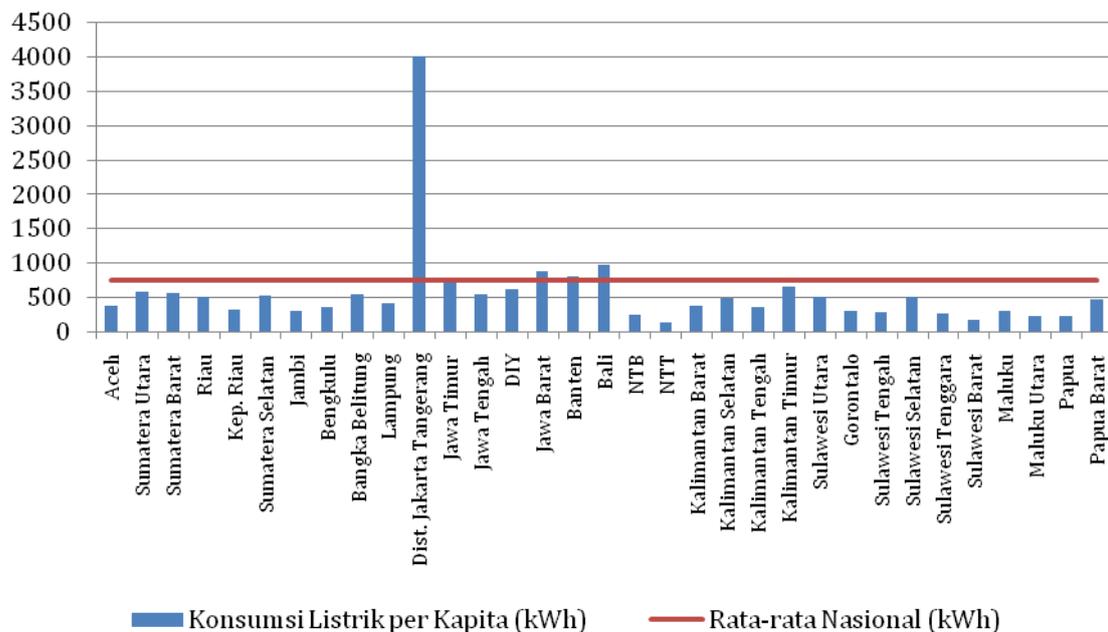
Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Km	%
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%		
Bengkulu	3.621	61	1.015	17	1.248	21	38	1	5.922	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur penting berikutnya adalah listrik karena listrik memfasilitasi industrialisasi. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Bengkulu relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional (Gambar 11).

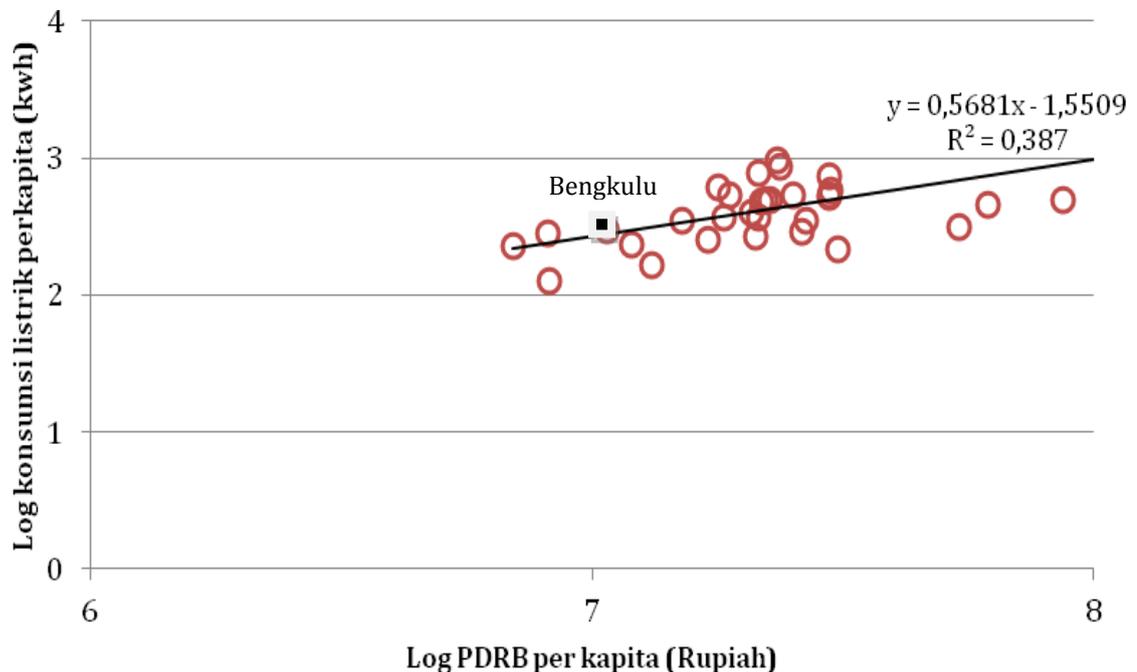
Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Dengan menggunakan perbandingan internasional, konsumsi listrik di Bengkulu lebih rendah dibanding wilayah dengan pendapatan per kapita setara.

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



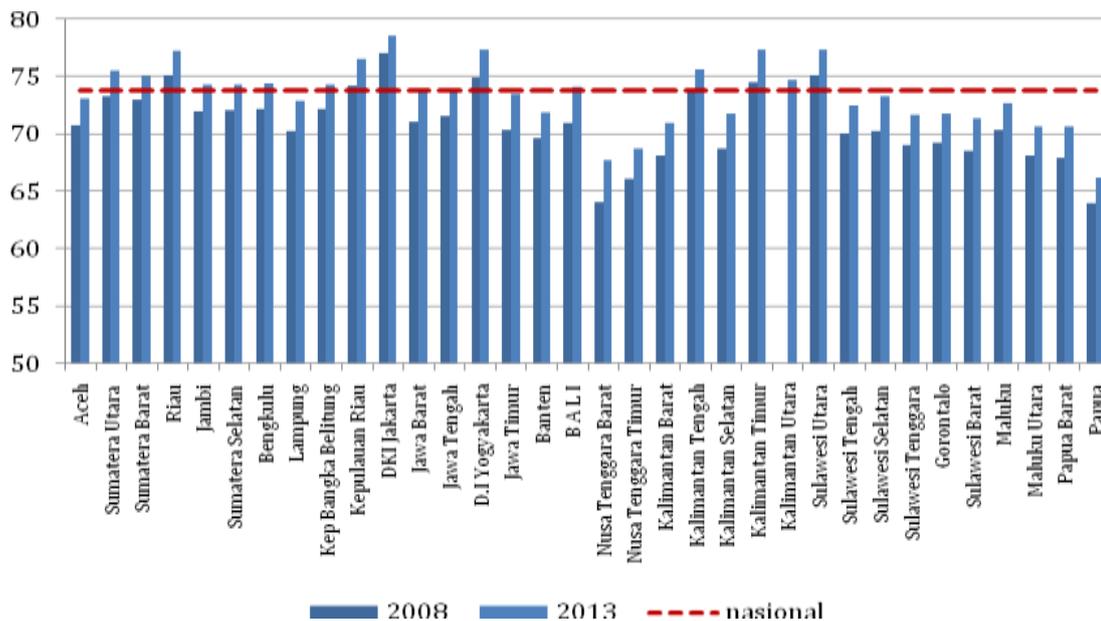
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Bengkulu yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

IPM Bengkulu berada pada peringkat 11 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 74,41. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 69,4 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,44 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Bengkulu meningkat dari 8 tahun pada 2008 menjadi 8,55 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Bengkulu pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 94,87 menjadi 96,55 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

6. Dana Simpanan Masyarakat Terbatas

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Terdapat hubungan yang saling menentukan antara tabungan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian yang terjadi di Bengkulu tampaknya adalah keterbatasan tabungan sebagai sumber permodalan permodalan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit terhadap simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang selalu lebih besar dari satu dan cenderung meningkat. Jika pada tahun 2005 rasio pinjaman terhadap simpanan adalah 1,01, pada tahun 2009 angkanya menjadi 1,52, dan tahun 2013 menjadi 1,14. Sebagai perbandingan, rasio kredit terhadap simpanan tahun 2009 untuk wilayah Sumatera adalah 1,22 dan rasio untuk nasional adalah 0,99 (Tabel 8). Hal ini mengindikasikan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Bengkulu.

Tabel 8
Posisi Simpanan dan Pinjaman pada Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Bengkulu	12.555	14.274	1,14	0,39
Sumatera	383.923	469.129	1,22	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

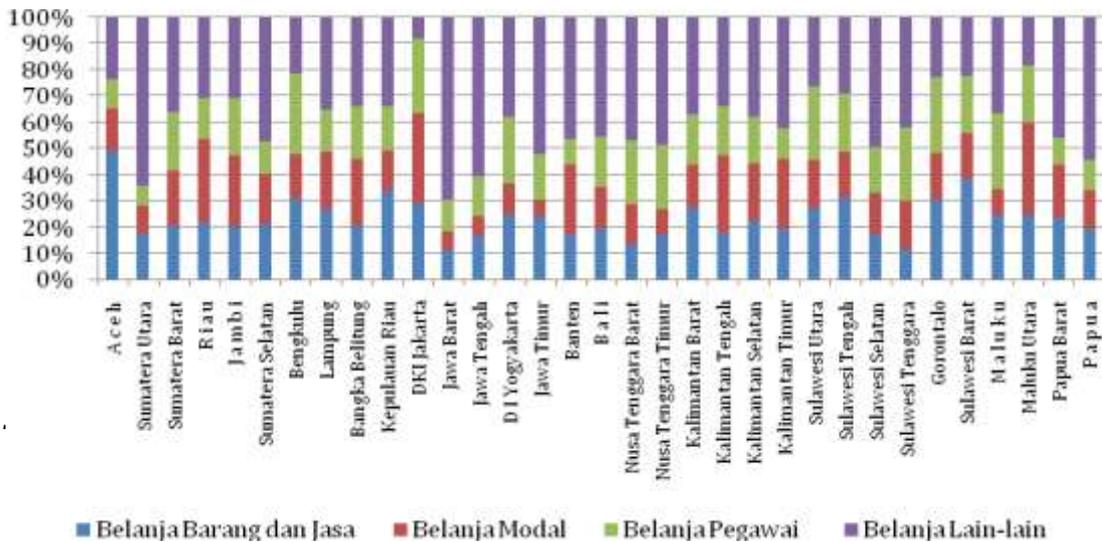
Sumber: BPS, 2013

Rasio investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat masih kurang dari satu. Artinya, sebenarnya potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Bengkulu adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

7. Kualitas Belanja Pemerintah Belum Mendukung Kinerja Perekonomian

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Bengkulu sebesar 16,73 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 30,72 persen (Gambar 14). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Realisasi percepatan pengembangan ekonomi Sumatera diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan Bengkulu diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Bengkulu dan konektivitasnya dengan Palembang yang merupakan pusat pertumbuhan terdekat di Wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek Bengkulu dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,9 – 8,4 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 kinerja ekonomi Bengkulu mengalami perbaikan. Investasi yang membaik menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pembangunan proyek pemerintah yang terus berjalan di tahun 2015. Pada tahun 2015 Provinsi Bengkulu ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan karet. Hasil panen kelapa sawit akan memberikan dampak positif bagi aktivitas industri pengolahan.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 14,7 – 10,3 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu sebesar 18,3 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Bengkulu harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 8 poin persentase atau 1,33 poin persentase per tahun.

3. Namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa prospek pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, baik internal daerah Bengkulu maupun eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, di antaranya melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor batubara dan kelapa sawit.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Dari hasil analisis di atas dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan daerah yang disaring berdasarkan kriteria: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Industrialisasi sektor pertanian
- b. Pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Perbaikan iklim investasi daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan
- f. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.